

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERORIENTASI KEMANDIRIAN
(STUDI PADA MASYARAKAT PESISIR KECAMATAN CAMPLONG KABUPATEN
SAMPANG)**

Luthfiya Fathi Pusposari, Umamah, Siti Shofiyah, dan Chania Dwi C
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstract

The aims of this study are (1) Describe the type of business and empowerment strategies are carried out on a group of craftsmen in the District of Camplong; (2) Describe efforts to achieve self-sufficiency in the economy in a group of craftsmen in the District of Camplong; and (3) Describe the obstacles faced in the community empowerment program to achieve economic independence in the group of craftsmen in the District of Camplong. This study used a qualitative approach various case studies. The collection of data are observation, interviews, and documentation. Data were analyzed by classified and reduction data, withdrawal the conclusion. Results of this research show, First: Strategies undertaken MDW in community development programs in the District of Camplong includes 7 steps. The type of business of the group of which are: 1) Pastries An-Nur village Dharma in Camplong; 2). Mukenah Gallery 99 in Tambaan villages; 3). Crackers Taddan in Taddan village; 4). Pastry Taddan in Taddan village; 5). Haji cap Ala Arabia in Taddan village; 6). Batik Mandangin in village Mandangin Island; and 7). Shoes in sejati village; Second: The efforts made by MDW to achieve economic independence in the group of craftsmen in the District of Camplong are: 1). Assistance to craftsmen / auxiliaries; 2). Changing the mindset of the community of workers / laborers to be a creator of employment / self-employment; 3). Facilitate group of craftsmen with the help of venture capital in the form of raw materials in accordance with their respective efforts; 4). Providing training for members of groups of craftsmen organized by the government or universities; 5). Building a partnership with a modern market in Sampang; Third: Obstacles encountered in community development programs in the district Camplong are: 1). Mindset and attitude of traditional society; 2). Weak human resources and low work ethic; 3). Limited funding / capital; 4). Uncertified IRT and the limited marketing / network

Keywords: independence and community empowerment

PENDAHULUAN

Menurut BPS (2015) Jumlah penduduk miskin di Indonesia Pada bulan Maret 2015 mencapai 28,59 juta orang (11,22%). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan September 2014, maka selama 6 bulan tersebut terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 0,86 juta orang sebesar 27,73 juta orang (10,96%).

Menyikapi kondisi sumber daya manusia Indonesia tersebut, maka perlu adanya upaya strategis untuk peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ini, secara mikro perlu adanya program-program pemberdayaan masyarakat untuk membekali keterampilan-keterampilan tertentu sehingga mereka bisa *survive* ditengah arus globalisasi dewasa ini.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Zubaedi, 2007:41). Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan (Mubyarto, 2000: 263-264)

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan memandirikan, serta menswadayakan masyarakat sesuai dengan potensi dan budaya lokal yang dimilikinya secara utuh dan komprehensif agar harkat dan martabat lapisan masyarakat yang kondisinya tidak mampu dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan

Jadi, dampak pemberdayaan masyarakat adalah kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan mereka melalui prakarsa dan kreatifitas untuk meningkatkan kualitas hidup. Tentunya membutuhkan masyarakat yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan sikap untuk keluar dari permasalahan mereka.

Kecamatan Camplong merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sampang, dengan rata-rata mata pencaharian utama masyarakatnya sebagai “angkatan laut” (nelayan). Aktivitas melaut ini mulai mendapat kendala ketika PT.Santos Australia melakukan eksplorasi minyak dan gas di sekitar wilayah tersebut, sehingga penghasilan masyarakat nelayan ini semakin berkurang

pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Camplong sebanyak 252.600 jiwa atau 27,88% dari total penduduk Kabupaten Sampang. Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 247.201 atau 26,97%, sedangkan pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin meningkat 1% menjadi 27,97% (Koran Madura, 2015). Kondisi ini diperkuat dengan

jumlah pengangguran Kabupaten Sampang tahun 2012 sebanyak 8,469 jiwa atau 1,78%, sementara pada tahun 2013 jumlah pengangguran sebanyak 21,826 jiwa atau 4,74% (Sampang dalam angka, 2014:97). ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah pengangguran di kabupaten Sampang.

Kecamatan Camplong-Sampang, merupakan salah satu kecamatan pesisir yang menjadi area terdampak dari adanya industri eksplorasi minyak dan gas oleh PT. Santos Australia yang ada di pulau Madura. Sebagai bentuk *Corporate Social Responsibility* (tanggung jawab sosial) dan konsekuensi logis dari operasional perusahaan, maka PT. Santos Australia melakukan kerjasama dengan instansi/Lembaga Swadaya Masyarakat Madura Development Watch (MDW) untuk memberdayakan masyarakat di area terdampak.

Hal ini akan memunculkan adanya kepedulian masyarakat terhadap industri dan memandang industri sebagai pihak yang harus didukung dan dijaga oleh masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengembangan masyarakat tidak hanya akan memberikan manfaat untuk masyarakat, namun juga akan memberikan keuntungan sangat besar bagi industri dengan adanya pandangan positif dari masyarakat. Salah satu bentuknya tahun 2015 ini, program pemberdayaan yang dicanangkan adalah kerajinan sepatu kulit khas Madura. Para pemuda pesisir diberi kesempatan untuk “bersekolah” selama 30 hari pada pengrajin sepatu yang ada di Sidoarjo.

Berdasarkan informasi awal dari hasil wawancara dengan salah satu ketua program pemberdayaan ini, Ibu Siti Farida M.Pd beliau menyatakan bahwa sebenarnya pemberdayaan masyarakat itu tidak hanya pengrajin sepatu, ada juga kelompok pengrajin batik tulis Mandangin Madura, pengrajin mukena, pengrajin peci, pengrajin kerupuk dan pengrajin kue kering. Keberadaan kelompok pengrajin ini, nantinya diharapkan memiliki kemandirian dalam bidang ekonomi dan finansial, sehingga mereka menjadi pengusaha-pengusaha sukses dan mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan tingkat perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk 1. mendeskripsikan jenis usaha dan strategi pemberdayaan yang dilakukan pada kelompok pengrajin di Kecamatan Camplong; 2. Untuk mendeskripsikan upaya mewujudkan kemandirian dalam bidang ekonomi pada kelompok pengrajin di Kecamatan Camplong 3. Untuk mendeskripsikan hambatan yang dihadapi dalam program pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian ekonomi pada kelompok pengrajin di Kecamatan Camplong.

TINJAUAN TEORITIS

1. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Karl Marx, pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan kaum *powerless* untuk memperoleh *surplus value* sebagai hak normatifnya. Perjuangan memperoleh *surplus value* dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi. Dan perjuangan untuk mendistribusikan penguasaan faktor-faktor produksi harus dilakukan melalui perjuangan politik. Kalau menurut Marx, pemberdayaan adalah pemberdayaan masyarakat, maka menurut Fiedmann (1992) pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga. Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis.

Selain Karl Marx dan Friedmann, masih banyak pandangan mengenai pengertian pemberdayaan, seperti Hulme dan Turner (1990), Robert Dahl (1963), Kassam (1989), sen dan Grown (1987), dan Paul(1987), yang pada prinsipnya adalah bahwa pemberdayaan adalah penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor produksi, dan penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya Mardi Yatmo Hutomo,2000).

Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang. Dengan demikian, dapatlah diartikan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi 1 : Menciptakan Iklim, Memperkuat Daya, dan Melindungi

Ginandjar Kartasasmita (1996) menyatakan dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: **Pertama**, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. **Kedua**, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, kesehatan, serta akses kedalam

sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. **Ketiga**, memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Strategi 2 : Program Pembangunan Pedesaan

Sunyoto Usman (2004:23) Pemerintah di negara-negara berkembang termasuk Indonesia telah mencanangkan berbagai macam program pedesaan, yaitu (1) pembangunan pertanian, (2) industrialisasi pedesaan, (3) pembangunan masyarakat desa terpadu, dan (4) strategi pusat pertumbuhan.

Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Wirawan memaparkan Indikator keberhasilan program pemberdayaan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin
2. Berkembangnya usaha dan peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia
3. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya
4. Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain dalam masyarakat
5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai dengan peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

2. Kemandirian Ekonomi

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 pasal 8 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam

pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Benny Susetyo (2006:126) Dalam konteks kemandirian, peran negara dibutuhkan tidak hanya dalam fungsinya semata-mata sebagai wasit alias penjaga malam, melainkan ia dibutuhkan untuk membantu kelompok kecil menengah agar bisa bersaing secara adil di pasar. Padahal kelompok kecil-menengah inilah yang menjadi penopang kekokohan perekonomian suatu bangsa. Tetapi apa daya, alasan demi ‘pasar yang sehat’ peran negara di negara berkembang untuk menolong wong cilik setiap detik terkikis habis oleh alasan ‘pasar’ di atas slogan privatisasi, kompetisi bebas, dll.

Kekuatan ekonomi global telah memaksa Indonesia untuk tunduk di atas perintah modal. Bahkan seringkali apa yang dilakukan negara tidak lagi mencerminkan kedaulatannya. Tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat seringkali terabaikan jika sudah berhadapan dengan pilihan siapa yang sesungguhnya diberdayakan. Pilihan negara tentu saja lebih memilih *save* jangka pendek, memihak kaum pemodal dan menggusur ekonomi wong cilik. Walaupun pilihan ini manis dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang justru mematikan tulang punggung kekuatan bangsa ini. Negara melalaikan hal itu, tidak mau mengambil pilihan pahit tapi berguna bagi masa depan, tapi cenderung mengambil pilihan yang menguntungkan diri sendiri dan kekuasaannya saja. Kemandirian ekonomi menjadi mitos bangsa ini karena usaha-usaha untuk mewujudkan tidak pernah dijadikan sebuah kebijakan untuk mendorong industri lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Melimpahnya produk asing merupakan cerminan bahwa bangsa tidak memiliki daya tawar untuk membangun alternatif ekonomi yang bersendikan kepada kekuatan diri sendiri.

Upaya Mewujudkan Kemandirian Masyarakat

Kemandirian ekonomi telah menjadi satu keniscayaan atau tuntutan yang harus segera diwujudkan oleh masyarakat. Yusuf Qardhawi (1997) Masyarakat/umat Islam harus memiliki berbagai pengalaman, kemampuan, sarana dan peralatan yang menjadikan ia mampu untuk memproduksi guna memenuhi kebutuhannya, baik secara materi ataupun non materi. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu adanya kemandirian bagi umat Islam, tanpa memiliki kemandirian ekonomi, umat Islam tidak akan bisa menjalankan fungsi Ustadziatul 'Alam (sokoguru dunia) dan menjadi saksi-saksi kebenaran atas ummat yang lainnya, dan juga tanpa

kemandirian maka umat tidak akan memiliki 'izzah (harga diri) sebagaimana Allah telah menetapkan 'izzah itu untuk mereka dalam kitab-Nya:

الْأَذَلَّ مِنْهَا الْأَعَزُّ لِيُخْرِجَنَّ الْمَدِينَةَ إِلَىٰ إِرَجَعْنَا لَئِن يَقُولُونَ
يَعْلَمُونَ لَا الْمُنَافِقِينَ وَلَكِنَّ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِرَسُولِهِ الْعِزَّةُ وَاللَّهُ

Artinya: Mereka berkata, “Sungguh, jika kita kembali ke Madinah (kembali dari perang tabuk), pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana.” Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya dan bagi orang-orang Mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui (QS.Al-Munaafiqun:8)

Agustianto (2015) Upaya untuk mewujudkan kemandirian masyarakat, dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: *Pertama*, membangun etos entrepreneurship umat/masyarakat dan membekali mereka dengan skills yang unggul dan berdaya saing. *Kedua*, melaksanakan training-training dan workshop keterampilan. Hal ini penting, karena kualitas SDM masih rendah. Selain itu perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan strata pendidikan umat melalui pendidikan formal, *Ketiga*, jika usaha kecil itu merupakan produsen, maka mereka harus dibantu dalam pemasaran produk-produknya. *Keempat*, meningkatkan kualitas produk yang memenuhi standar. *Kelima*, memberikan dukungan permodalan melalui program pemerintah, lembaga perbankan dan keuangan mikro syariah. *Keenam*, mendorong dan memotvasi umat untuk produktif di sector pertanian, pertambangan, perkebunan, dan sebagainya agar mereka mandiri secara ekonomi, *Ketujuh*, membantu usaha kecil dan mikro dalam mengakses lembaga perbankan, baik dalam pembuatan proposal, membuat laporan keuangan dan penerapan manajemen keuangan yang modern. *Kedelapan*, optimalisasi peran pemerintah dalam kebijakan dan regulasi. Kebijakan pemerintah harus benar-benar prorakyat. Kita harus mendesain sistem ekonomi yang lebih mengikuti kaidah-kaidah prorakyat yang menitikberatkan pada pemerataan dan kesejahteraan guna menghasilkan keadilan.

3. Faktor-faktor Penghambat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan dapat berasal dari kepribadian individu dalam komunitas dan bisa juga berasal dari sistem sosial. Hakim (2008) Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya sumber daya manusia (SDM)
2. Sikap masyarakat yang tradisional
3. Kelembagaan
4. Lemahnya pendampingan
5. Keterbatasan modal
6. Kurangnya hubungan dengan masyarakat luar
7. Perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi yang terlambat
8. Rasa tidak percaya diri (self distrust)

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang tidak selalu mencari sebab akibat namun lebih berupaya memahami situasi tertentu, dengan bentuk penelitian studi kasus (*case study*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu (Suharsimi Arikunto 1998:131)

Dalam implementasiya penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara terperinci tentang gejala dan fenomena yang diteliti yaitu mengenai masalah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat berorientasi kemandirian ekonomi atau persoalan yang berkenaan dengan objek kajian penelitian ini. Maka penelitian ini menggunakan analisis deskriptif karena hasil dari penelitian ini berupa data deskriptif dalam bentuk kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati (interview, observasi dan dokumentasi) serta hal-hal lain yang berkaitan dan diperlukan dalam penelitian.

2. Situs Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang sebagai area terdampak dari kegiatan eksplorasi minyak dan gas oleh PT. Santos Australia. Penelitian ini dilakukan di beberapa desa seperti Desa Sejati, Desa Dharma sebagai lokasi dimana kelompok pengrajin itu berada.

3. Kehadiran Peneliti

Noeng Muhajir (2010:388) Kehadiran penelitian di situs penelitian menjadi sebuah keniscayaan, karena dalam penelitian kualitatif *instrument key*-nya adalah peneliti itu sendiri.

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen utama, yaitu sebagai pengamat, *interviewer* dan sekaligus sebagai pengumpul data.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tiga (3) metode yakni, (1) observasi; (2) wawancara; dan (3) dokumentasi.

- a. Teknik Observasi: Guba dan Lincoln (1981) dalam Lexy J. Moleong (2007:174-175) observasi berperan penting dilakukannya dengan beberapa alasan: (a) teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung; (b) teknik pengamatan juga memungkinkan peneliti dapat melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya; (c) pengamatan dapat digunakan untuk mengecek keabsahan data; (d) teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, (e) pada kasus-kasus tertentu dimana penggunaan teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, maka pengamatan dapat menjadi alat yang sangat berguna, dan (f) sering terjadi keraguan pada penelitian, yang menyebabkan kekeliruan data atau bias. Teknik observasi ini dilakukan pada saat studi pendahuluan dan pengumpulan data yaitu dengan mengamati berbagai aktivitas para pengrajin dalam melakukan produksi.
- b. Teknik Wawancara Mendalam (*in-depth interview*); Teknik wawancara secara mendalam memerlukan pedoman. Pedoman wawancara yang dilakukan peneliti adalah pedoman wawancara tidak terstruktur yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan, dengan demikian kreatifitas peneliti sangat diperlukan (Suharsimi Arikonto, 1998:131). Wawancara dilakukan dengan para informan, Informan dalam penelitian ini adalah anggota kelompok pengrajin, ketua atau anggota LSM Madura Development Watch selaku pembina dan fasilitator kelompok pengrajin, atau pihak-pihak lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam program pemberdayaan ini.
- c. Dokumentasi (*documentation*) yakni mempelajari atau menelaah dokumen-dokumen yang relevan dengan konteks penelitian. Dokumen-dokumen tersebut utamanya yang berhubungan langsung dengan strategi pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Camplong.

5. Pengecekan Keabsahan Temuan

Dalam menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas kriteria tertentu, yaitu derajat kepercayaan (*credability*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) (Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, 2012:314-319) Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga triangulasi yakni triangulasi sumber, metode dan teori. Sebagaimana saran yang disampaikan oleh Sanafiah Faisal (1990:13) bahwa untuk mencapai standar kredibilitas hasil penelitian setidaknya menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif terdiri dari: klasifikasi data dan reduksi data, metode analisis dan pembahasan, dan penarikan kesimpulan. Sebagaimana langkah-langkah yang dianjurkan oleh Bogdan dan Biklen, (1982: 145-170).

TEMUAN PENELITIAN

1. Gambaran Umum tentang Situs Penelitian

Kabupaten Sampang merupakan satu dari empat kabupaten yang terletak di Pulau Madura (Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep). Kabupaten Sampang terletak antara 113°08' sampai dengan 113°39' Bujur Timur dan 06°05' sampai dengan 07°13' Lintang Selatan. Batas Daerah: di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan, di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan. Secara umum wilayah Kabupaten Sampang berupa daratan, terdapat satu pulau yang terpisah dari daratan bernama Pulau Mandangin/Pulau Kambing. Luas wilayah Kabupaten Sampang yang sekitar 1233,33 km² yang habis dibagi menjadi 14 kecamatan dan 186 desa/ Kelurahan (BPS, 2014:3)

Kecamatan Camplong merupakan salah satu kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sampang. Kecamatan Camplong merupakan daerah agraris, dimana hamparan wilayahnya berupa tanah pertanian. Tanah pertaniannya mayoritas berupa sawah dan ladang. Luas kecamatan Camplong 69,93 Km² atau 5,65% dari total kabupaten Sampang. Kecamatan Camplong berada pada ketinggian 6.993m dari permukaan laut dan jarak tempuh

dari ibu kota kabupaten ± 10 Km. Kecamatan Camplong terdiri dari 14 desa, 76 dusun, 79 RW dan 183 RT dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 81.812 jiwa terdiri dari 39.917 laki-laki dan 41.895 perempuan. Secara administratif kecamatan Camplong terdiri dari 14 desa yaitu: Desa Anggersek, Desa Banjar Tabulu, Desa Banjar Talela, Desa Batu Karang, Desa Dharma Camplong, Desa Dharma Tanjung, Desa Madupat, Desa Pamolaan, Desa Plampaan, Desa Prajjan, Desa Rabasan, Desa Sejati, Desa Taddan, dan Desa Tambaan

Selain itu wilayah Kecamatan Camplong berbatasan dengan beberapa kecamatan, yakni:

Batas sebelah selatan	: Selat Madura
Batas sebelah barat	: Kecamatan Sampang
Batas sebelah utara	: Kecamatan Omben
Batas sebelah timur	: Kecamatan Tlanakan Pamekasan

Tingkat ekonomi masyarakat kecamatan Camplong pada umumnya secara keseluruhan bisa dikatakan cukup baik. Meskipun demikian ada beberapa warga yang tingkat ekonominya masih dibawah standar. Adapun mata pencaharian penduduk setempat sebagian besar bergerak di sektor pertanian dan nelayan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Jenis dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat

a. Jenis Pemberdayaan Masyarakat

Adapun usaha-usaha dari kelompok pengrajin berupa: 1) Usaha Kue Kering An-Nur desa Dharma Camplong; 2). Usaha Mukenah Galeri 99 desa Tambaan; 3). Usaha Kerupuk Taddan desa Taddan; 4). Usaha Kue Kering Taddan desa Taddan; 5). Usaha Peci Haji Ala Arabia desa Taddan; 6). Usaha Batik Mandangin desa Pulau Mandangin; dan 7). Usaha Sepatu desa Sejati

b. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Starategi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Madura Development Watch (MDW) sebagai fasilitator pemberdayaan terhadap masyarakat Kecamatan Camplong atau kecamatan terdampak dari adanya eksplorasi minyak dan gas oleh PT. Santos Australia menunjukkan bahwa lembaga independen ini telah berusaha menumbuhkan kemampuan masyarakat terdampak yang selama ini masyarakat sekitar menjadi tenaga kasar untuk berkreasi dan berinovasi dalam bidang usaha-usaha yang lebih menjanjikan. Berdasarkan temuan penelitian strategi yang dilakukan MDW dengan melakukan:

- 1) Melakukan PRA (*Participatory Rural Appraisal*) dan *mapping social* untuk menggali potensi yang ada di 7 desa terdampak melalui kegiatan survey pendahuluan secara akurat
- 2) Melakukan jaring aspirasi masyarakat untuk mengetahui usulan-usulan dari masyarakat. Melalui kegiatan ini masyarakat bisa mengajukan jenis usaha yang dimiliki dan jika memenuhi syarat dapat dikembangkan.
- 3) Menentukan sasaran/kelompok yang berpotensi menjadi kelompok binaan, yaitu kelompok yang mempunyai usaha yang bisa/akan diberdayakan, terbentuknya kelompok dan pengurus pada masing-masing kelompok usaha, kegiatan usaha dijalankan secara berkelompok.
- 4) Koordinasi dengan kepala desa dan melibatkan pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Keterlibatan pemerintah menjadi sangat penting, karena merupakan salah satu pilar yang diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ada tiga pilar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras.
- 5) Mensosialisasikan program pemberdayaan dengan tujuan agar sasaran atau penerima manfaat mengetahui peruntukan modal, mekanisme kerja dari pengelolaan bantuan. Sosialisasi sangat penting untuk dilakukan, karena kadang kelompok pengrajin itu tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan bantuan yang ada. Jika tidak ada sosialisasi khawatir program yang dicanangkan tidak terlaksana
- 6) Mengadakan pelatihan teknis sesuai dengan usaha yang ditekuni kelompok pengrajin dan pelatihan manajemen meliputi manajemen keuangan, pemasaran dan wirausaha.
- 7) Melakukan pendampingan, Pendampingan terhadap masyarakat/kelompok pengrajin ini memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar.
- 8) Melakukan monitoring kemajuan usaha dari kelompok pengrajin; Keberhasilan program pemberdayaan ini dapat dilihat dengan menilai adanya *added value* bagi masyarakat jika dibandingkan dengan kondisi mereka sebelum dan sesudah adanya program, salah satu ukurannya misalnya apakah mereka sudah berdaya secara ekonomis atau bahkan bisa menularkan ilmunya kepada masyarakat sekitarnya.

Sejatinya apa yang dilakukan oleh tim pemberdayaan masyarakat ini menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki kepedulian yang tinggi dalam upaya menciptakan dan mengembangkan

potensi masyarakat desa khususnya di Kecamatan Camplong. Strategi yang dilakukan MDW ini adalah membangun suasana yang memungkinkan masyarakat mampu membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta mengoptimalkannya, mampu berkreasi dan berinovasi, mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dari usaha yang ditekuni dan pada akhirnya masyarakat bisa mandiri. Temuan empiris ini didukung oleh Ginandjar (1996) yang menyatakan bahwa: dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: **Pertama**, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). **Kedua**, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). **Ketiga**, perlindungan terhadap yang lemah.

2. Upaya Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Kemandirian adalah satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi berbagai masalah demi mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri terhadap berbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan.

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang dilakukan oleh MDW sebagai fasilitator program pemberdayaan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendampingan terhadap kelompok pengrajin/binaan. Pendampingan ini dilakukan untuk terus memantau perkembangan dan kemajuan usaha dari kelompok pengrajin. Pendampingan ini terutama terkait dengan pencapaian target bagi masing-masing kelompok pengrajin, misalnya usaha kue kering harapannya 2 tahun sudah mandiri, pengrajin batik dan pengrajin sepatu harapannya 3 tahun sudah mandiri.
- b. Merubah mindset masyarakat dari pekerja/buruh menjadi pencipta lapangan kerja/berwiraswasta. Dalam hal ini pemberian pemahaman kepada masyarakat bahwa semua orang punya potensi untuk dikembangkan, sehingga masyarakat bisa termotivasi untuk terus berupaya dan berusaha serta tidak berpangku tangan.
- c. Memfasilitasi kelompok pengrajin dengan bantuan modal usaha berupa bahan baku sesuai dengan usahanya masing-masing, kemudahan akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal melalui pinjaman ke Bank BPRS. Temuan di lapangan terkait pemberian modal usaha ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Sumidiningrat

bahwa kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berupa: (1) Peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) Peningkatan akses pengembangan SDM; dan (3) Peningkatan akses sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal (Gunawan Sumidiningrat, 1999:34).

- d. Memberikan pelatihan-pelatihan bagi anggota kelompok pengrajin yang diselenggarakan pemerintah atau perguruan tinggi. Pelatihan tentang manajemen keuangan, pemasaran, wirausaha dan pengurusan Pendaftaran Industri Rumah Tangga.

Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat disamping diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek.

Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual, dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut di dunia usaha, atau contoh-contoh konkrit yang terjadi dalam praktek usaha. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus ia jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausahanya.

- e. Membangun kemitraan dengan pasar modern yang ada di kabupaten Sampang. Pemberdayaan ekonomi rakyat, sejatinya tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang. Jadi program pemberdayaan selain bantuan modal yang berupa peralatan produksi juga melakukan kemitraan dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian dan UMKM dan juga dengan swalayan-swalayan yang ada di kabupaten Sampang.

Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi *give power to everybody*. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana

yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan (Mardi Yatmo Hutomo, 2000).

Gunawan Sumidiningrat (1998:34) Ada beberapa kebijakan dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: (1) Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; (3) Pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) Penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (6) pemerataan spasial.

Yang lebih penting lagi, bahwa peran negara/pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sampang) dibutuhkan dalam rangka membantu kelompok usaha kecil menengah agar mampu bersaing secara adil di pasar. Agustino (2015) mengungkapkan upaya untuk mewujudkan kemandirian: jika Usaha kecil itu merupakan produsen, maka mereka harus dibantu dalam pemasaran produk-produknya. Meningkatkan kualitas produk yang memenuhi standar. Memberikan dukungan permodalan melalui program pemerintah, lembaga perbankan dan keuangan mikro syariah. Membantu usaha kecil dan mikro dalam mengakses lembaga perbankan, baik dalam pembuatan proposal, membuat laporan keuangan dan penerapan manajemen keuangan yang modern. Optimalisasi peran pemerintah dalam kebijakan dan regulasi.

3. Hambatan-Hamabatan Yang Dihadapi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam program pemberdayaan ini, yaitu:

a. Mindset dan Sikap Masyarakat yang Tradisional

Masyarakat pesisir yang notabene masih tradisional kadang mereka antipati terhadap perubahan. Persepsi mereka ketika ada program pemberdayaan menganggap akan ada “bagi-bagi jatah” atau pemberian uang. Sikap Masyarakat yang masih tradisional ini umumnya beranggapan bahwa bantuan dari lembaga swasta (PT. Santos) dan pemerintah dengan jenis apapun yang disalurkan tersebut, tidak perlu dikembalikan. Akibatnya, penggunaan bantuan

itu tidak optimal. Kurangnya sosialisasi dan pendekatan terhadap masyarakat sasaran merupakan salah satu pemicu timbulnya anggapan tersebut selain budaya tradisional yang menganggap bahwa menjadi memang kewajiban pemerintah menyalurkan dana gratis.

Sikap tradisional yang seperti ini tentunya karena mereka kurang komunikasi dengan dunia luar. Masyarakat yang kurang melakukan hubungan dengan masyarakat luar dapat menyebabkan kurangnya mendapat informasi tentang perkembangan dunia. Hal ini mengakibatkan masyarakat tersebut terasing dan tetap terkurung dalam pola-pola pemikiran yang sempit dan lama. Selain itu mereka cenderung tetap mempertahankan tradisi yang tidak mendorong kearah kemajuan (<http://nsimeon.blogspot.co.id/2014>)

Pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas.

b. Sumber Daya Manusia yang Lemah dan Etos Kerja yang Rendah

Masyarakat pesisir yang menjadi sasaran program pemberdayaan ini umumnya merupakan nelayan tradisional yang tergolong masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Dengan kondisi tersebut, dibenak mereka hanya ada bagaimana saya bisa melangsungkan hidup. Ini berarti yang mereka pikirkan hanya perut. Secara psikologis, mereka cepat puas dengan yang apa diperolehnya, sehingga mereka tidak tertarik dengan segala macam aturan, himbauan dan sebagainya termasuk program-program pemberdayaan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga formal. Kondisi ekonomi yang terkekang secara sosial dan kondisi alam menyebabkan psikologis masyarakat nelayan ini mudah puas dan kurang berpandangan untuk kepentingan masa depan. Sumber daya manusia yang rendah dapat dilihat dari aspek pendidikan yang umumnya diabaikan oleh masyarakat nelayan tradisional. Bukan hanya karena factor psikologis saja, tetapi karena aksesibilitas menuju sarana pendidikan juga umumnya masih kurang dan memerlukan biaya tambahan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Mardi Yamo H bahwa hampir pada setiap program pemberdayaan, aspek pengembangan sumberdaya manusia dijadikan salah satu komponennya. Tetapi juga hampir disemua program pemberdayaan, aspek pengembangan sumberdaya manusia ini hanya dilakukan ala kadarnya. Tidak ada usaha sistematis dan rencana strategis untuk pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat. Oleh sebab itu, pengembangan sumberdaya manusia dalam

rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, harus mendapat penanganan yang serius. Sebab sumberdaya manusia adalah unsur paling fundamental dalam penguatan ekonomi rakyat (Mardi Yatmo Hutomo, 2000:11).

c. Keterbatasan Pendanaan/Modal

Keterbatasan modal yang mereka hadapi memaksa mereka harus mencari jalan pintas seperti berhutang, menggadaikan barang berharga yang dimiliki atau usaha-usaha lain agar mereka mampu memproduksi. Disini perlu adanya bantuan modal usaha, selain dalam bentuk bahan baku tetapi mungkin dalam bentuk pinjaman usaha yang diberikan pada kelompok pengrajin yang ada di Kecamatan Camplong ini. Oleh sebab itu, cara yang cukup elegan dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan adalah dengan menjamin kredit mereka di lembaga keuangan yang ada, dan atau memberi subsidi bunga atas pinjaman mereka dilembaga keuangan.

d. Belum Memiliki Sertifikat IRT dan Sempitnya Pemasaran/Jaringan

Kemitraan usaha bukanlah penguasaan yang satu atas yang lain, khususnya yang besar atas yang kecil, melainkan menjamin kemandirian pihak-pihak yang bermitra, karena kemitraan bukanlah proses merger atau akuisisi. Kemitraan usaha yang kita inginkan bukanlah kemitraan yang bebas nilai, melainkan kemitraan yang tetap dilandasi oleh tanggung jawab moral dan etika bisnis yang sehat, yang sesuai dengan demokrasi ekonomi.

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau walaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan kelompok pengrajin, pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah.

Kalau diperhatikan, sebenarnya Kecamatan Camplong sendiri sangat potensial untuk pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh anggota kelompok pengrajin, karena di Kecamatan Camplong ada tempat wisata (Pantai Camplong) yang dapat dijadikan tempat pemasaran. Keberadaan Pantai Camplong tentunya bisa dimanfaatkan untuk membangun “jaringan baru”, sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh pengrajin dikenal oleh masyarakat luas.

Kesimpulan dan Implikasi Penelitian

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan temuan penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Strategi yang dilakukan MDW dalam program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Camplong adalah sebagai berikut: 1). Melakukan PRA (*Participatory Rural Appraisal*) dan *mapping social*; 2). Melakukan jaring aspirasi masyarakat untuk mengetahui usulan-usulan dari masyarakat; 3). Menentukan sasaran/kelompok yang berpotensi menjadi kelompok binaan; 4). Koordinasi dengan kepala desa dan melibatkan pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing; 5). Mensosialisasikan program pemberdayaan dengan tujuan agar sasaran atau penerima manfaat mengetahui peruntukan modal, mekanisme kerja dari pengelolaan bantuan; 6). Mengadakan pelatihan teknis sesuai dengan usaha yang ditekuni kelompok pengrajin dan pelatihan manajemen meliputi manajemen keuangan, pemasaran dan wirausaha; 7). Melakukan pendampingan; 8). Melakukan monitoring kemajuan usaha dari kelompok pengrajin.
- b. Ada beberapa jenis usaha kelompok pengrajin yang diberdayakan melalui program ini, yaitu: 1) Usaha Kue Kering An-Nur desa Dharma Camplong; 2). Usaha Mukenah Galeri 99 desa Tambaan; 3). Usaha Kerupuk Taddan desa Taddan; 4). Usaha Kue Kering Taddan desa Taddan; 5). Usaha Peci Haji Ala Arabia desa Taddan; 6). Usaha Batik Mandangin desa Pulau Mandangin; dan 7). Usaha Sepatu desa Sejati. Upaya-upaya yang dilakukan oleh MDW untuk mewujudkan kemandirian ekonomi pada kelompok pengrajin di Kecamatan Camplong adalah sebagai berikut: 1). Pendampingan terhadap kelompok pengrajin/binaan; 2). Merubah mindset masyarakat dari pekerja/buruh menjadi pencipta lapangan kerja/berwiraswasta; 3). Memfasilitasi kelompok pengrajin dengan bantuan modal usaha berupa bahan baku sesuai dengan usahanya masing-masing, kemudahan akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal melalui pinjaman ke Bank BPRS; 4). Memberikan pelatihan-pelatihan bagi anggota kelompok pengrajin yang diselenggarakan pemerintah atau perguruan tinggi; 5). Membangun kemitraan dengan pasar modern yang ada di kabupaten Sampang
- c. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam program pemberdayaan masyarakat di kecamatan Camplong adalah sebagai berikut: 1). Mindset dan sikap masyarakat yang tradisional; 2).

Sumber daya manusia yang lemah dan etos kerja yang rendah; 3). Keterbatasan pendanaan/modal; 4). Belum memiliki sertifikat IRT dan sempitnya pemasaran/jaringan.

2. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya program pemberdayaan masyarakat oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Madura Development Wacth (MDW) yang disponsori oleh PT. Santos Australia ini memberi dampak yang positif bagi masyarakat di area terdampak. Masyarakat pesisir dapat mengembangkan dan mengoptimalkan potensi lokal yang berupa industri rumahan sesuai dengan usahanya masing-masing.

Keberadaan industri rumahan yang mereka kembangkan berimplikasi terhadap semakin meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Artinya pemberdayaan yang dilakukan telah mampu mewujudkan kemandirian ekonomi pada masyarakat. Agar industri rumahan yang geluti masyarakat pesisir tetap eksis, maka tetap perlu adanya pantauan dari fasilitator dan juga perhatian dari pemerintah setempat.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustianto, *Mewujudkan Kemandirian ekonomi Umat*, <http://www.agustiantocentre.com/?p=962>, diakses pada tanggal 20 Maret 2015
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi IV). (Jakarta: PT. Rineka Cipta)
- Koran Madura, 8 Oktober 2015, *Tiga Tahun, Sampang Daerah Tertinggal*
- Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik No. 47/05/Th. XVIII, 5 Mei 2015* (Sensus Pertanian 2013)
- Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik No. 86/09/Th. XVIII, 15 September 2015* (Sensus Ekonomi 2016)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang. *Sampang dalam Angka 2014/Sampang In Figures 2014, Buku Putih Kabupaten Sampang 2014*
- Bogdan dan Biklen. 1982. *Qualitative Reseach for Education, An Introduction to Theory and Methods*. Allyn dan Bacon Inc
- Eko, Sutoro. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim. Samarinda. Desember 2002

- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif, Dasar-Daar dan Aplikasi*. (Malang: Yayasan Asih Asah Asuh)
- Friedmann. 1992. *Empowement: the Politics of Alternative Development*. (Cambridge Mass: Blackwell Publisher.)
- Ghony, M. Djunaidi dan Almanshur, Fauzan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Ar-ruzz Media)
- Hotmatua Daulay dan Mulyanto (ed.). 2001. *Membangun SDM dan Kapabilitas Teknologi Umat*. (Bandung: ISTECS)
- <http://Politik.Kompasiana.Com/2015/01/28/bingkisan-100-hari-jokowi-narasi-baru-indonesia-katanya-704347.html>. Diakses Tanggal 10 Maret 2015 Jam 17.00 WIB
- <https://anhakim.wordpress.com/2008/01/08/sebuah-tinjauan-beberapa-kendala-pemberdayaan-masyarakat-perikanan/>, Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2015
- <http://nsimeon.blogspot.co.id/2014/01/faktor-faktor-penghambat-dan-pendorong.html>, Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2015
- Hutomo, Mardi Yatmo. 2000. Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi. *Jurnal Naskah*. No. 20. Juni-Juli
- Hutomo, Mardi Yatmo. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, Makalah Disampaikan dalam Seminar Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas. Tanggal 6 Maret 2000 di Jakarta
- Hotmatua Daulay dan Mulyanto (ed.). 2001. *Membangun SDM dan Kapabilitas Teknologi Umat*, (Bandung: ISTECS)
- Kartasasmita, Ginandjar. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Kemitraan Guna Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri*. Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional Lembaga Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi (LP2KMK-GOLKAR). Jakarta. 7 Nopember 1996
- Lincoln & Guba. 1995. *Naturalistic Inquiry*. (New Delhi: Sage Publication)
- Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE)
- Muhajir, Noeng. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin)
- Murdayati. 2006. Peran *Corporate Social Responsibility* bagi Masyarakat. *Jurnal Littai*. Volume IV. Nomor 12
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya)

Nasution, S. 2007. *Modode Reearch (Penelitian Ilmiah)*. (Jakarta: Bumi Aksara)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. (Bandung: Alfabeta)